

Kebijakan Filipina Era Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Klaim 9 Dash Line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Katong Ragawi Numadi

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: ragawinumadik19@gmail.com

Abstract

The problem of South China Sea ownership disputes from the start has been a major factor in the growing relationship between the Philippines and China. The new period in the disputes between the two countries began in 2009 with the filing of China's 9 dash line claim against the United Nations. This latest claim signifies China's sovereignty over the entire South China Sea region. Along with China's latest claims have resulted in increased tension in the region along with an increasingly aggressive response by the Philippine Government since 2011. The election of Rodrigo Duterte as President of the Philippines then presents a new Philippine approach to China regarding his claim in the South China Sea. Unlike previous leaders, President Duterte actually brought the Philippines into a cooperative policy towards China, although on the other hand there is not indication of the Philippines to release its claim in the South China Sea. Various policies then set by the government to get closer to China. To explain the reason for this new Philippine strategy, the researchers looked at the imbalance factor in the Philippines' capability compared to China resulting in the Philippine Government's current preference for cooperative action. The Philippines' cooperative choice relates to the reality of the benefits gained for cooperating rather than continuously fighting against China's dominance in the region.

Keywords: *Philippines, China, 9 dash line claim*

Abstrak

Permasalahan sengketa kepemilikan Laut Tiongkok Selatan sejak awal telah menjadi faktor utama memanasnya hubungan Filipina dan Tiongkok. Periode baru dalam sengketa kedua negara dimulai pada tahun 2009 dengan pengajuan klaim 9 dash line Tiongkok terhadap PBB. Klaim terbaru ini menandakan kedaulatan Tiongkok terhadap keseluruhan kawasan Laut Tiongkok Selatan. Seiring dengan klaim terbaru Tiongkok tersebut mengakibatkan peningkatan tensi konflik di kawasan seiring dengan respon yang kian agresif oleh Pemerintah Filipina sejak tahun 2011. Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina kemudian menghadirkan pendekatan baru Filipina terhadap Tiongkok terkait klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, Presiden Duterte justru membawa Filipina pada kebijakan kooperatif terhadap Tiongkok walaupun disisi lain tidak terdapat indikasi Filipina untuk melepaskan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Berbagai kebijakan kemudian ditetapkan pemerintah guna mendekatkan diri terhadap Tiongkok. Untuk menjelaskan alasan strategi baru Filipina ini, peneliti melihat pada faktor ketimpangan kapabilitas Filipina dibandingkan dengan Tiongkok menghasilkan preferensi Pemerintah Filipina saat ini untuk bertindak kooperatif. Pilihan kooperatif Filipina tersebut berhubungan kenyataan manfaat yang diperoleh untuk bersikap kooperatif ketimbang melakukan perlawanan secara terus menerus terhadap dominasi Tiongkok di kawasan.

Kata Kunci: *Filipina, Tiongkok, Klaim 9 dash line*

Pendahuluan

Permasalahan mengenai kepemilikan Laut Tiongkok Selatan mencakup kawasan seperti Spratlys dan Scarborough dalam beberapa periode sejak 1970-an seolah menjadi pembentuk utama pola hubungan antara Filipina dan Tiongkok. Terkait dengan permasalahan sengketa, isu terbaru adalah mengenai klaim 9 dash line oleh Tiongkok pada Mei tahun 2009 menandai babak baru kembali memanasnya hubungan di antara kedua negara. Dalam klaim terbarunya ini, Tiongkok menetapkan wilayah lautan yang dimiliki meliputi seluruh bagian Laut Tiongkok Selatan seperti yang tertera dalam peta resmi pada pemerintahan Kuomintang tahun 1947 dan masa awal pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949 (Zhao, 2012 : 58). Bagi Filipina dan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan memiliki nilai strategis tersendiri yang kemudian mendasari sengketa perebutan wilayah yang diantara keduanya beserta negara pengklaim lainnya. Laut Tiongkok Selatan dianggap sebagai salah satu laut terpenting seiring dengan peranannya sebagai penghubung perdagangan dunia yang diikuti dengan kekayaan alam di dalamnya (Simons, 2012: 995). Sejak awal permasalahan ini muncul, secara konsisten Pemerintah Filipina melakukan pertimbangan dalam mengatasi ancaman Tiongkok terutama melalui Amerika Serikat dan ASEAN sebagai aliansi utama. Begitu juga ketika terjadi peningkatan tensi tahun 1990-an Pemerintah Filipina aktif melakukan langkah protes diplomatik begitu juga melalui jalan multilateral terutama di ranah ASEAN dengan menginisiasi perjanjian terkait Laut Tiongkok Selatan guna melindungi klaim kedaulatan teritorial negaranya (Storey, 1999: 109). Pemerintah Filipina juga memastikan kembali komitmen Amerika Serikat. Pemerintahan era Ramos menginisiasi erubahan perjanjian militer keduanya dari Status of Military Agreement (SOFA) menjadi Visiting of Military Agreement (VFA) guna memberikan keleluasaan dalam Mutual Defense Treaty (MDT)

diantara keduanya (Patugalan, 1999: 140).

Sehubungan dengan klaim terbaru Tiongkok berupa klaim 9 dash line tahun 2009 bersamaan dengan peningkatan agresifitas yang ditunjukkan, Presiden Benigno Aquino III konsisten merespon tindakan yang dilakukan Tiongkok secara agresif. Sebagai implementasinya, berbagai kebijakan dilakukan sebagai bentuk pertentangan terhadap sikap Tiongkok termasuk semakin mendekatkan diri pada aliansi dengan Amerika Serikat. Melakukan pertimbangan melalui masuknya Amerika Serikat ini menjadi preferensi utama Filipina guna menanggapi perilaku agresif Tiongkok (Simons, 2012: 995). Selain itu dalam implementasinya pemerintahan Filipina langsung melakukan langkah militer preventif dengan merubah fokus militer Filipina yang semula terhadap aspek keamanan internal menjadi terkonsentrasi pada pertahanan teritorial maritim (Zhao, 2012: 59). Langkah ini ditambah peningkatan antisipasi melalui pengembangan aspek pertahanan minimum melalui pengesahan undang-undang modernisasi pertahanan tahun 2012 guna memperkuat armada pertahanan lautnya (Ortuoste, 2013: 241). Terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai presiden pada Juni 2016 justru menghadirkan pendekatan baru Filipina dalam menghadapi isu Laut Tiongkok Selatan yang berlangsung. Secara umum Duterte meninggalkan agenda kebijakan yang dilakukan Presiden Aquino III menuju pada langkah kebijakan yang lebih independen terutama berkaitan dengan isu di Laut Tiongkok Selatan (Castro, 2016). Duterte justru menunjukkan pendekatan yang lebih kooperatif terhadap Tiongkok. Filipina dewasa ini justru membuka diri terhadap segala upaya kerjasama yang memungkinkan terhadap Tiongkok.

Beberapa indikasi kooperasi diperlihatkan Pemerintahan Presiden Duterte, seperti yang dikutip Townshend (dalam CNN, 2016) bahwa telah terjadi kesepakatan diantara Filipina dan

Tiongkok mengenai wilayah Scarborough yang kemudian menjadi momentum awal perbaikan hubungan diantara keduanya. Terkait hal ini dikutip oleh Kipgen (dalam The Diplomat, 2017) Presiden Duterte menyatakan bahwa Pemerintahannya ingin mengubah adanya pendekatan konfrontatif terhadap Tiongkok bahkan menyebutkan bahwa keraguannya pada kemampuan kontrol penuh Filipina terhadap sumber daya di wilayah Karang Scarborough tanpa Tiongkok seiring dengan ketimpangan kemampuan Filipina. Pernyataan tersebut diimplementasikan dengan senantiasa membuka pembicaraan diplomatik terhadap Tiongkok terkait isu Laut Tiongkok Selatan. Bahkan segala persiapan telah dilakukan dalam mewujudkan perbaikan hubungan Filipina terhadap Tiongkok. Sebagai aksi nyata Pemerintah Filipina menginstruksikan menghentikan segala kegiatan pembangunan di wilayah persengketaan yang dikomplain oleh pemerintahan Tiongkok. Hal ini dilakukan dilandasi oleh guna perbaikan hubungan terhadap Tiongkok terutama menyangkut hubungan diplomatik baik secara bilateral maupun dalam lingkup regional secara umum (Castro, 2016). Langkah baru yang dilakukan oleh Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengapa Pemerintahan Filipina era Presiden Rodrigo Duterte menerapkan kebijakan luar negeri lebih kooperatif terhadap Tiongkok terkait klaim 9 dash line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan?

Pengaruh Situasi Sistem Internasional Terhadap Penentuan Kebijakan Luar Negeri Kooperatif dalam Situasi Sengketa

Berbeda dengan melihat secara keseluruhan unsur domestik yang dimiliki oleh negara, analisis kebijakan pada sistem internasional lebih melihat kepada keseluruhan struktur internasional yang berkembang serta pengaruhnya bagi negara tertentu. Seiring dengan pemahaman tersebut

Breuning (2007 : 150) dalam teorinya mengungkapkan bahwa penting bagi pembuat keputusan untuk mempertimbangkan perkembangan di level internasional yang dialami. Persepsi pada tingkatan analisis ini memandang bahwa pemimpin negara atau pembuat keputusan memperhatikan kondisi pada sistem menyangkut lingkungan internasional disekitar dalam menentukan pilihan dari setiap opsi kebijakan yang tersedia. Pembuat keputusan dituntut dalam melihat setiap peluang terutama dalam membantu mengamankan kepentingan negaranya (Breuning, 2007: 141). Dalam suatu sistem setiap negara memiliki kapabilitas berbeda yang kemudian menjadikan indikator kekuatan potensialnya terhadap satu sama lainnya. Berdasarkan hal tersebut kemudian memunculkan adanya kategorisasi negara kedalam beberapa golongan. Melalui perhitungan akumulasi atribut yang dimiliki dapat ditentukan penggolongan negara kedalam tiga pengklasifikasian berdasarkan jumlah akumulasi meliputi super power, middle power, dan small power. Secara umum negara dengan kapabilitas mumpuni cenderung memiliki tekanan dalam level internasional yang lebih kecil ketimbang yang dialami oleh negara dengan kapabilitas yang rendah. Hal ini sering dengan semakin banyaknya pertimbangan yang diperlukan dalam penentuan kebijakan berkaitan dengan posisinya yang inferior dibandingkan pihak lain yang lebih kuat. Kecenderungan yang muncul negara dengan kekuatan dominan akan selalu berusaha diimbangi oleh kekuatan lain maupun dalam bentuk aliansi pengimbang. Sementara itu sebagai pihak yang merasa paling terancam, negara dengan kapabilitas kekuatan yang kecil tentu akan memiliki kecenderungan untuk melindungi diri melalui kekuatan yang lebih dominan (Hudson, 2014: 174).

Berkaitan dengan peran kekuatan relatif negara dalam sistem dibalik langkah kebijakan yang diambil dalam sengketa kedaulatan, teori oleh Wang (2014 : 15) mengungkapkan , aspek

kekuatan tidak dapat dikesampingkan memiliki peranan dibalik penentuan kebijakan negara mengenai situasi konflik yang dihadapi. Pemikir realis modern menilai bahwa semakin dalam adanya asimetri kekuatan diantara dua pihak yang bersengketa maka semakin minim kemungkinan eskalasi diambil sebagai pilihan kebijakan yang dilakukan negara. Hal ini dikarenakan pihak yang lebih inferior secara rasional mempertimbangkan kecilnya kemungkinan perang sehingga lebih mengutamakan langkah negosiasi dalam penyelesaiannya ketimbang bersifat agresif. Lebih lanjut Wang (2014 : 10) mengungkapkan bahwa kemungkinan untuk terjadinya sikap kooperasi dalam konflik teritorial meningkat sejalan dengan besarnya nilai kegunaan secara ekonomi yang secara langsung akan memfasilitasi keuntungan mutual dan menginspirasi resolusi konflik secara solutif. Teori Wang tersebut berdasar pada pandangan Fravel (2008 : 18) bahwa sikap kompromi oleh negara dalam konflik teritorial muncul berdasarkan posisi kekuatan secara relatif terhadap lawannya terutama terhadap pihak dengan negara terkuat di kawasan. Logika ini mengindikasikan bahwa negara dengan kekuatan lemah akan cenderung untuk melakukan koalisi bahkan menciptakan ikatan terhadap negara dengan kapabilitas paling mumpuni di kawasan. Kecenderungan insentif untuk kooperatif ini kemudian didukung oleh situasi ketika terdapat kompetisi secara spesifik dalam konflik teritorial dengan pihak terkuat di kawasan.

Kecenderungan kebijakan negara dengan kapabilitas lebih kecil seperti yang diungkapkan diatas merujuk pada penerapan strategi bandwagoning. Stephen Walt (1985) dalam tulisannya mengungkapkan kemungkinan bandwagoning adalah bahwa negara yang menghadapi ancaman eksternal akan melakukan aliansi terhadap pihak yang paling mengancam. Dalam hal ini adanya diferensiasi kekuatan diantara aktor menentukan tendensi negara dalam merespon ancaman yang

diberikan. Semakin besar perbedaan kekuatan yang dimiliki negara terkuat maka akan semakin besar kemungkinan negara tetangga lainnya untuk mengaliansikan diri (Walt, 1985). Dikalangan negara-negara Asia Tenggara Goh (2007: 119) mendefinisikan strategi ini sebagai Omni-Enmeshment terutama dalam menghadapi kekuatan dominan yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan. Omni-Enmeshment yang mengacu pada adanya pelibatan terhadap negara-negara besar yang muncul dalam kawasan regional. Pelibatan ini dilakukan dengan tujuan jangka panjang terutama dalam konteks memberikan jaminan bagi keamanan regional. Negara-negara Asia Tenggara dalam teori ini dijelaskan bahwa memiliki ketakutan tersendiri mengenai ketidakpastian kondisi yang ditimbulkan oleh tatanan multipolar yang muncul, maka dari itu melalui proses ini regional Asia Tenggara sendiri mencoba menjaring seluruh kekuatan besar yang muncul. Asia Tenggara melalui Omni-Enmeshment ini digambarkan tidak ingin terlibat atau memilih kekuatan besar yang saling bersaing namun memutuskan untuk merangkul seluruh kekuatan tersebut (Goh, 2007: 120). Pelibatan oleh negara-negara di Asia Tenggara terhadap great power secara umum terimplementasikan dalam beberapa bentuk kebijakan. Terhadap Tiongkok upaya engage yang dilakukan baik berupa bilateralisme maupun melalui kerangka multinasional pada level regional. Bukan hanya terhadap Tiongkok namun tindakan sedemikian rupa juga dibangun dengan Amerika Serikat maupun kekuatan potensial lainnya seperti Jepang, India, dan Korea Selatan (Goh, 2007: 122). Maka dari itu dapat dipahami bahwa ketimbang memihak dalam kontestasi diantara kekuatan besar yang muncul, negara-negara Asia Tenggara cenderung berkomitmen menjaga keseimbangan diantara kekuatan besar tersebut. Komitmen ini terimplementasi dalam beberapa cara yang terdiri dari inklusi legitimasi yang berhubungan dengan ikatan bilateral spesifik dalam bidang ekonomi dan politik ataupun dalam

institusi multinasional terhadap kekuatan besar yang muncul. Kedua adalah melalui interaksi institusional berupa interaksi yang bersifat menguntungkan semua pihak. Ketiga adalah melalui penciptaan keamanan kooperatif antar satu sama lain menyangkut isu multidimensional.

Klaimi 9 Dash Line Tiongkok dan Klaim Kedaulatan Filipina Terhadap Laut Tiongkok Selatan

Kemunculan klaim 9 dash line terhadap Laut Tiongkok Selatan oleh Pemerintah Tiongkok dimulai pada bulan Mei tahun 2009. Tiongkok mengirimkan nota verbale yang menunjukkan kepemilikan keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan (Sichun dan Hong, 2014: 36). Klaim terbaru oleh Tiongkok ini berakar Klaim terbaru Tiongkok ini sebenarnya berakar pada sisi historis bahwa kawasan Laut Tiongkok Selatan utamanya Kepulauan Spratlys dan Paracel merupakan bagian dari kekuasaan Kedinastian Tiongkok pada masa lalu. Klaim historis Tiongkok didasarkan pada argumen sejahrawan bahwa leluhur mereka telah menemukan kawasan ini sejak masa dinasti Han abad ke-2 M. Para sejahrawan ini menambahkan bahwa dari abad ke-10 hingga ke-14, terdapat penguasaan kawasan ini oleh Dinasti Song dan Yuan. Begitu juga pada Dinasti Ming dan Qing pada abad ke-15 hingga abad ke-19 memasukan kawasan Spratlys dan Paracel sebagai bagian teritorialnya. (Kaplan, 2014: 42). Mengacu hal tersebut Pemerintahan Nasionalis Guomintang Tiongkok sebelum dan sesudah Perang Dunia menampilkan wilayah kekuasaan Tiongkok adalah meliputi keseluruhan Laut Tiongkok Selatan. Transisi menuju Pemerintahan Komunis pada tahun 1949 juga tidak merubah persepsi Tiongkok terhadap kawasan laut ini sebagai bagian dari wilayah teritorialnya (Zhao, 2012: 59).

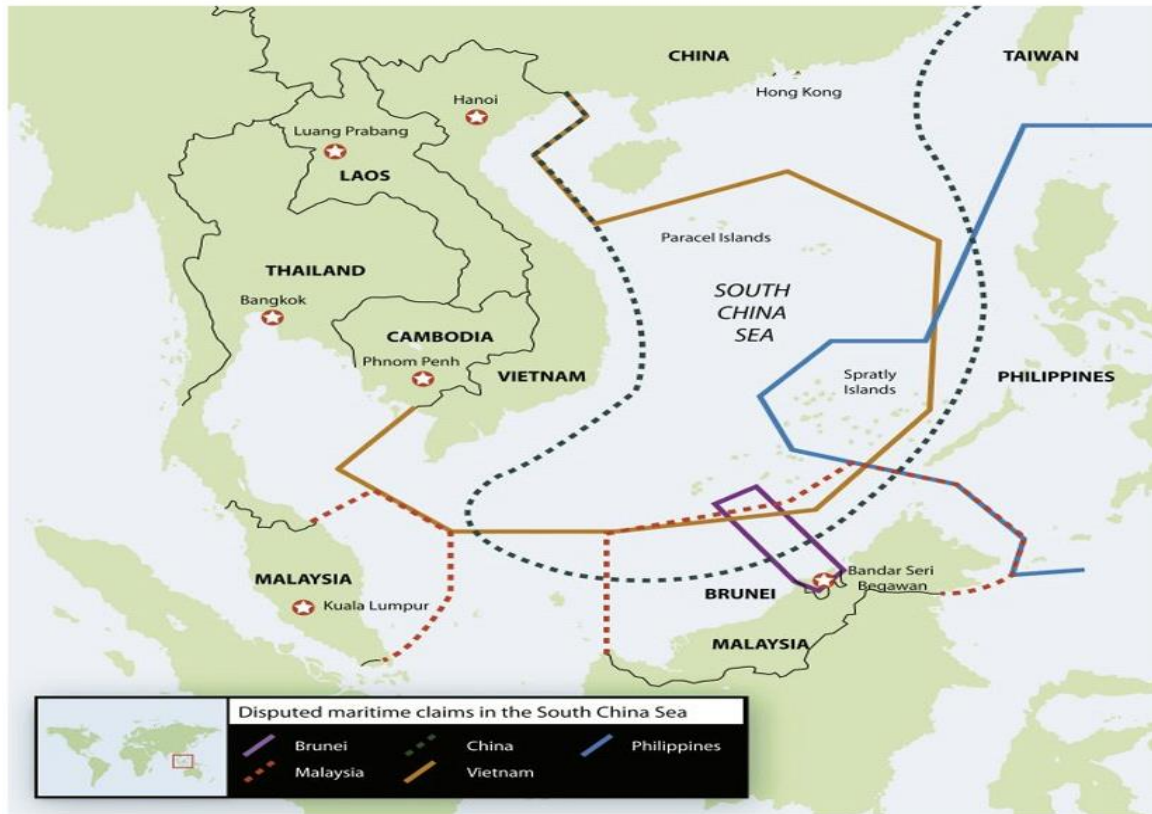
Klaim 9 dash line menegaskan kepemilikan atas Laut Tiongkok Selatan hingga mencapai 90 persen sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok. Klaim

ini berupa garis kekuasaan teritorial berbentuk U-shape mengarah ke selatan hingga lebih dari 2000 Kilometer dari daratan utama Tiongkok dengan menempatkan sembilan garis utama sebagai penegasannya. Klaim ini tentu merupakan pelanggaran apabila mengacu pada ketetapan UNCLOS, bahwa batas teritorial laut Tiongkok seharusnya hanya sebesar 12 mil laut dari daratan utamanya dan Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut dari laut teritorial. Garis 9 dash line ini membentang dari Kepulauan Paracel di timur daratan Vietnam menuju ke utara perairan Kepulauan Natuna di Selatan hingga meliputi Kepulauan Spratlys dan daerah Karang Scarborough yang dekat dari daratan Filipina (Simon, 2012: 996). Dapat dilihat (gambar 1) klaim terbaru Tiongkok bertentangan dengan klaim kedaulatan Filipina. Kedua negara terlibat dalam perselisihan mengenai kepemilikan lebih dari lima puluh pulau di Spratlys. Filipina mengklaim sebagian besar lokasi di 230 mil barat Pulau Palawan yang kemudian dinamai sebagai wilayah Kalayan. Klaim Filipina ini didasarkan atas perjanjian masa penjajahan seperti halnya Perjanjian Paris 1898, Perjanjian Washington 1900, dan Perjanjian dengan Inggris Raya 1930 mengindikasikan bahwa batas barat wilayah Filipina mencapai wilayah Spratlys dan Karang Scarborough. Catatan sejarah era kolonial tersebut mendasari pengajuan klaim Filipina kepada PBB. Berawal dari penemuan Thomas Cloma terhadap kawasan Spratlys (Kalayan) tanpa pemilik pada tahun 1950-an. Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1971 kemudian melakukan aneksasi Spratlys dengan menetapkan hukum garis dasar kepulauan dan skala geografis sebagai bagian dari ZEE Filipina. Filipina kemudian menempatkan Spratlys (Kalayan) sebagai bagian dari wilayah administrasi yuridiksi Provinsi Palawan berlandaskan pada Dekrit Presiden 1596 yang dikeluarkan Presiden Marcos dan didasari oleh aturan klaim res nullius dan konteks kedekatan geografis (Ortueste, 2013: 240). Sementara menyusul tuntutan pengajuan klaim UNCLOS

tahun 2009, berdasarkan prinsip hukum internasional *la terre domine la mer* Filipina mendukung mengenai status keseluruhan *Spartlys* (Kalayan) sebagai

regime island UNCLOS namun harus tetap di bawah pengelolaan Filipina berdasarkan Piagam UNCLOS 121 (Sichun dan Hong, 2014: 37).

Gambar 1: Peta Sengketa Maritim di Laut Cina Selatan



Source: IHS/Jane's

Sumber:

Sengketa kepemilikan Laut Tiongkok Selatan tidak terlepas dari besarnya nilai strategis wilayah laut ini bagi negara-negara disekitarnya. Nilai strategis Laut Tiongkok Selatan berhubungan dengan fungsinya sebagai salah satu jalur perdagangan serta kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam yang terkandung. Bagi Tiongkok yang sedang mengalami proses perkembangan sebagai kekuatan perekonomian baru, klaim *9 dash line* terlihat sebagai urgensi tersendiri. Urgensi pertama adalah mengenai jalur perdagangan. Tercatat bahwa tahun 2016, Laut Tiongkok Selatan berperan dalam aktivitas perdagangan dunia dengan nilai mencapai 3,37 triliun USD. Bagi

Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua, peranan Laut Tiongkok Selatan merupakan *sea line of communication* (SLOC) vital. Signifikansi ini dibuktikan oleh data IMF Trade Statistic (dalam CSIS, 2018) bahwa pada tahun 2016 sebesar 1.470 milyar USD nilai perdagangan atau sekitar 39,5% dari total keseluruhan perdagangan barang Tiongkok melalui Laut Tiongkok Selatan. Kedua ketergantungan lain terhadap Laut Tiongkok Selatan sehubungan dengan kebutuhan akan potensi energi yang dimiliki. Laut Tiongkok Selatan terindikasi memiliki potensi sumber energi esensial bagi negara terutama bagi rising economic power seperti halnya Tiongkok. Pemerintah Tiongkok

memprediksi Laut Tiongkok Selatan menyimpan cadangan minyak hingga mencapai 130 milyar barel bersamaan dengan klaim kekayaan gas alam diestimasikan mencapai angka 900 trilyun kaki kubik (Kaplan, 2014: 37). Urgensi kepemilikan terhadap Laut Tiongkok Selatan juga terkait dengan konteks pertahanan. Secara geografis Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu pintu masuk menuju daratan Tiongkok paling mudah dari Samudera Pasifik. Laut Tiongkok Selatan merupakan elemen penting bagi Tiongkok dalam menjaga keseimbangan kekuatan terhadap Amerika Serikat yang tepat berada di seberang Samudera Pasifik. Begitu juga dengan perlindungan diri dari Jepang dan Korea Selatan beserta kekuatan yang lebih kecil seperti Vietnam dan Filipina yang disokong oleh militer Amerika Serikat yang berjumlah puluhan ribu di beberapa pangkalan utamanya di Korea Selatan dan Jepang (Kaplan, 2014: 43). Kepentingan klaim 9 dash line Tiongkok yang terakhir adalah sehubungan dengan pentingnya Laut Tiongkok Selatan dalam mendukung program One Belt One Road (OBOR). Diketahui melalui peta OBOR, secara geopolitik, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur sutra maritim utama kawasan Samudera Pasifik melewati Selat Malaka kemudian menuju Samudera Hindia untuk menjangkau negara Asia Selatan, Afrika dan pintu masuk menuju Timur Tengah dan Eropa (Cai, 2017: 2).

Klaim 9 dash line Tiongkok menimbulkan ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara terutama Filipina dengan adanya langkah agresif yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dengan pengembangan kekuatan militer yang dilakukan di kawasan sengketa. Tiongkok melakukan pengembangan perlengkapan persenjatanya untuk kemudian ditempatkan di beberapa basis militer yang dibangun di beberapa pulau tersebut. Pembangunan fisik ini kemudian dibarengi dengan tindakan bersifat koersif seperti tindakan provokasi kecil terhadap negara pengklaim lainnya melalui aksi seperti

melalui blokade kapal dan penangkapan nelayan (Heristovitch, 2017). Langkah ini diimplementasikan dengan pengembangan kekuatan pertahanan melalui pengembangan aset pertahanan, penempatan pasukan, hingga pembangunan basis militer baru di kawasan Spratlys. Pembaharuan perlengkapan militer di Laut Tiongkok Selatan ini terbilang kompleks meliputi kekuatan tempur laut seperti kapal selam, kapal induk, begitu juga dengan kelengkapan misil terutama teknologi nuklir sebagai penunjang utama. Selain itu sebagai pendukung Tiongkok juga fokus pada pengembangan armada udara dengan pembaharuan teknologi pesawat tempurnya. Tercatat pada tahun 2010 Tiongkok merupakan negara teratas dengan produksi pembuatan kapal terutama kapal selam dan kapal perang permukaan begitu juga dengan perlengkapan pertahanan udara dan balistik anti-kapal (Kaplan, 2014: 38). Selain pengembangan aspek alat pertahanan militer Tiongkok dalam kawasan kian menguat seiring gencarnya pembangunan infrastruktur basis militer di tujuh pulau karang wilayah Spratlys. Ketujuh pulau artifisial ini meliputi McKennan, Subi, Mischief, Johnson, Kalderon, Fiery, dan Burgos. Tercatat bahwa hingga tahun 2015, Tiongkok telah melakukan reklamasi terhadap tujuh pulau karang mencapai luas 3200 acres teritori sebagai pusat pertahanan meliputi misil nuklir, pesawat tempur, kapal karier, dan senjata bom strategis (Herscovitch, 2017).

Dominasi Kekuatan Militer dan Ekonomi Tiongkok sebagai *Great Power* Terhadap Filipina dan Negara-Negara Asia Tenggara

Klaim terbaru Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan menjadikan dilema tersendiri bagi Filipina dan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini berhubungan dengan dominasi kekuatan Tiongkok secara ekonomi dan militer sebagai *great power* dibandingkan negara lain di kawasan. Dalam konteks Ekonomi Terdapat persepsi bahwa kekuatan ekonomi Tiongkok dewasa ini

telah sejajar atau bahkan melampau Amerika Serikat baik dalam regional Asia Pasifik maupun secara Global. Hal tersebut berkaca pada data perbandingan keduanya pada sektor ekonomi menempatkan Tiongkok sebagai negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Berdasarkan data World Bank dan IMF menempatkan Tiongkok sebagai negara perekonomian terbesar mengacu pada perhitungan Purchasing Power Parity (PPP). Pada tahun 2016 Tiongkok mencatatkan nilai Gross Income Purchasing Power Parity 17,92 triliun USD unggul dari Amerika Serikat berada pada nilai 17,81 triliun USD. Data ini kemudian didukung dengan fakta berbagai keunggulan perekonomian Tiongkok dalam beberapa sektor dibandingkan dengan Amerika Serikat. Begitu juga dalam konteks aliran Foreign Direct Investment (FDI) Tiongkok unggul dengan angka 350 milyar USD berbanding 290 milyar USD yang dicatatkan Amerika Serikat. Pada sektor lain yaitu cadangan ekonomi total, Tiongkok menunjukkan potensi cadangan sebesar 4 triliun USD berbanding Amerika Serikat dengan kisaran 440 milyar USD. Mengacu pada beberapa indikator positif tersebut, data menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan mencapai 7,5% berbanding 2,5% oleh Amerika Serikat dalam lima tahun terakhir (Willige, 2016).

Di Kawasan Asia Tenggara, kekuatan ekonomi Tiongkok tidak dapat ditandingkan dengan Filipina maupun negara Asia Tenggara lainnya. Pada indikator GDP Tiongkok mampu

mencatatkan angka mencapai 11 triliun USD pada 2016. Sementara itu disisi lain Filipina hanya mampu mencatatkan angka 305 milyar dolar Amerika Serikat pada tahun 2016 (World Bank, 2017). GDP Vietnam pada tahun yang sama hanya mencapai angka 202 milyar USD. Sementara itu angka GDP Malaysia pada kisaran 296 milyar USD. Adanya perbedaan signifikan ini menandakan dominasi Tiongkok dari segi kapabilitas ekonomi yang tidak dapat disaingi oleh negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan lainnya. Dominasi yang dimiliki Tiongkok diikuti dengan peranannya yang dominan bagi negara-negara Asia Tenggara terutama dalam aspek perdagangan Tiongkok merupakan partner ekonomi terbesar Asia Tenggara. Berdasarkan perhitungan persentase trade share dalam rentan tahun 2000-2015 nilai persentase perdagangan Tiongkok di Asia Tenggara meningkat fluktuatif dari sebesar 5% pada tahun 2000 mencapai nilai diatas 15% pada tahun 2015. Peningkatan ini terbilang kontras seiring dengan tren penurunan kontribusi perdagangan yang dialami Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa yang hanya mencapai 8% hingga 10% perdagangan di Asia Tenggara pada tahun 2015 (IMF DOTS dalam Ah, 2017). Data perdagangan GAO (2015) juga mencatat, Tiongkok telah mengguguli nilai ekspor ke Asia Tenggara sejak tahun 2004 begitu juga dengan nilai impor dari Asia Tenggara sejak tahun 2007. Kondisi ini kemudian terus berlanjut dapat dilihat berdasarkan data tabel USCC (2015) dibawah yang menunjukkan bahwa tren peningkatan peranan Tiongkok dalam perdagangan negara-negara Asia Tenggara.

Tabel 1:

(US\$ billions)

		US\$ million				Share of ASEAN (%)			
		1998	2003	2008	2013	1998	2003	2008	2013
ASEAN Total	Exports	10,919	30,935	114,139	244,133	100%	100%	100%	100%
	Imports	12,589	47,350	117,012	199,402	100%	100%	100%	100%
	Balance	(1,670)	(16,415)	(2,873)	44,731	100%	100%	100%	100%
<i>High-Income</i>									
Brunei	Exports	560	34	130	1,704	5.1%	0.1%	0.1%	0.7%
	Imports	0	311	83	87	0.0%	0.7%	0.1%	0.0%
	Balance	560	(277)	47	1,617				
Singapore	Exports	3,901	8,873	32,325	45,886	35.7%	28.7%	28.3%	18.8%
	Imports	4,226	10,486	20,092	29,969	33.6%	22.1%	17.2%	15.0%
	Balance	(325)	(1,613)	12,233	15,918				
<i>Middle-Income</i>									
Indonesia	Exports	1,172	4,482	17,210	36,947	10.7%	14.5%	15.1%	15.1%
	Imports	2,462	5,754	14,387	31,479	19.6%	12.2%	12.3%	15.8%
	Balance	(1,290)	(1,272)	2,823	5,469				
Malaysia	Exports	1,594	6,142	21,383	45,941	14.6%	19.9%	18.7%	18.8%
	Imports	2,675	13,998	32,131	60,068	21.2%	29.6%	27.5%	30.1%
	Balance	(1,080)	(7,856)	(10,748)	(14,128)				
Thailand	Exports	1,170	3,829	15,521	32,738	10.7%	12.4%	13.6%	13.4%
	Imports	2,423	8,829	25,636	38,518	19.2%	18.6%	21.9%	19.3%
	Balance	(1,253)	(5,000)	(10,116)	(5,780)				
The Philippines	Exports	1,499	3,094	9,088	19,836	13.7%	10.0%	8.0%	8.1%
	Imports	517	6,309	19,508	18,205	4.1%	13.3%	16.7%	9.1%
	Balance	982	(3,215)	(10,420)	1,631				
<i>Low-Income</i>									
Burma	Exports	n.a.	908	1,979	7,349	n.a.	2.9%	1.7%	3.0%
	Imports	n.a.	170	645	2,810	n.a.	0.4%	0.6%	1.4%
	Balance	n.a.	738	1,335	4,540				
Cambodia	Exports	n.a.	295	1,095	3,411	n.a.	1.0%	1.0%	1.4%
	Imports	n.a.	26	39	361	n.a.	0.1%	0.0%	0.2%
	Balance	n.a.	268	1,056	3,050				
Laos	Exports	n.a.	98	268	1,721	n.a.	0.3%	0.2%	0.7%
	Imports	n.a.	11	149	1,021	n.a.	0.0%	0.1%	0.5%
	Balance	n.a.	87	119	701				
Vietnam	Exports	1,024	3,180	15,139	48,599	9.4%	10.3%	13.3%	19.9%
	Imports	217	1,455	4,343	16,886	1.7%	3.1%	3.7%	8.5%
	Balance	806	1,725	10,797	31,714				

Sumber:

Bukan hanya mengenai perdagangan, negara-negara di Asia Tenggara yang sedang berkembang juga membutuhkan dana investasi Tiongkok bagi pertumbuhan perekonomian dan penunjang program pembangunan yang sedang digencarkan pembangunan. Indikasi ini terlihat melalui data aliran FDI Tiongkok yang menguasai 14% dari total FDI di Asia Tenggara dengan nominal total 6,4 milyar USD pada tahun 2015. Berdasarkan data yang dihimpun CIEC (dalam Ah, 2017), di kawasan Asia Tenggara terdapat kontrak bantuan konstruksi infrastruktur oleh Tiongkok pada tahun 2015 mencapai 30 milyar USD terdistribusi dalam aktivitas konstruksi pembangunan negara berkembang di Asia Tenggara. Dikaitkan dengan permasalahan sengketa Laut Tiongkok Selatan, dapat dikatakan terjadi dilema negara-negara pengklaim lain di Asia Tenggara. Besarnya keterlibatan Tiongkok dalam

perekonomian Asia Tenggara berdasarkan data tersebut menjadi international constrain tersendiri sehingga negara-negara ini kesulitan menentukan posisinya dalam sengketa kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan. Pada satu sisi perkembangan Tiongkok merupakan ancaman kedaulatan teritorial namun di sisi lain menghasilkan peluang ekonomi besar. Terjadi dependensi perdagangan negara-negara terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan terhadap perkembangan ekonomi Tiongkok.

Sejalan dengan peningkatan kekuatan ekonomi yang dialami, aspek pertahanan militer Tiongkok juga berkembang menjadi saah satu kekuatan dominan global. Hingga tahun 2018 berdasarkan klaim Global Fire Power (2018) Tiongkok merupakan negara terbesar ketiga berdasarkan pada perhitungan jumlah kekuatan

pertahanannya. Dewasa ini kapabilitas militer Tiongkok didukung oleh kuantitas aset pertahanan melimpah dalam setiap sektornya. Tercatat oleh Global Fire Power (2018) Tiongkok memiliki ribuan aset pertahanan pada setiap sektor baik laut, udara maupun darat. Keunggulan kelengkapan pertahanan dari segi jumlah diikuti pada pengembangan kualitas pertahanan mumpuni melalui program modernisasi pertahanan yang sedang digencarkan. Perlengkapan pertahanan konvensional tersebut kemudian didukung dengan pengembangan pada sektor persenjataan nuklirnya. Tercatat berdasarkan data SIPRI pada tahun 2017, perkembangan persenjataan nuklir Tiongkok sejak tahun 1964 menghasilkan simpanan kekuatan nuklir mencapai 270 warheads. Jumlah tersebut telah menempatkan Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan senjata nuklir kelima di dunia dan urutan pertama di Asia mengungguli kepemilikan India dan Pakistan yang hanya pada rata-rata 150 warheads. Berbagai perkembangan baik kuantitas maupun kualitas menunjukkan bahwa secara militer Tiongkok dapat disandingkan dengan Amerika Serikat sebagai aktor dominan di Asia Pasifik. Tidak hanya mengenai kuantitas pertahanan yang dimiliki, Amerika Serikat yang sebelumnya begitu dominan dengan keberadaan pangkalan militer di Busan, Yokosuka, Okinawa, Changi dan Guam dewasa ini mulai tereduksi bersamaan dengan keberadaan lima pangkalan militer yang ditempatkan pihak Tiongkok tepat di perbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan berhadapan langsung dengan empat pangkalan milik Amerika Serikat (Tweed dan Leung, 2018).

Kelengkapan kapabilitas persenjataan Tiongkok dewasa ini tidak dapat disandingkan dengan aktor lain di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks menghadapi Tiongkok dalam sengketa kepemilikan laut, Filipina hanya didukung 172 ribu personel tentara aktif dengan 119 aset pertahanan laut. Dukungan pertahanan udara Filipina juga hanya terdiri dari 158 unit. Begitu

juga dengan kondisi negara Asia Tenggara lain juga relatif sangat inferior terhadap Tiongkok. Berdasarkan data kuantitas aset pertahanan Tiongkok pada setiap sektornya juga masih unggul dibandingkan akumulasi total keseluruhan aset militer yang dimiliki setiap negara Asia Tenggara (Global Fire Power, 2018). Begitu juga pada sisi kualitas aset pertahanan, Tiongkok dapat dikatakan jauh mengungguli Asia Tenggara berkaca pada berbagai pembaharuan teknologi misil dan nuklir yang tidak mampu dikembangkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Begitu juga dengan teknologi kapal laut dan pesawat tempur, kualitas pertahanan Tiongkok secara mandiri telah mampu menghasilkan berbagai varian teknologi baru kapal perang dan pesawat tempur yang sebanding dengan Amerika Serikat sementara sebaliknya negara-negara Asia Tenggara sebagian besar masih menghadapi permasalahan keterbatasan jumlah dan varian.

Dalam konteks sengketa kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, peneliti melihat ketimpangan kuantitas kapabilitas tersebut melalui dua sisi. Dari sisi Tiongkok, dominasi kekuatan militer yang kian meningkat secara relatif terhadap Asia Tenggara semakin memungkinkan dalam melakukan tindakan agresif seiring dengan minimnya tekanan ancaman secara militer yang mampu diberikan dari pihak negara-negara Asia Tenggara. Sebaliknya, bagi negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut Tiongkok Selatan, peningkatan kapabilitas Tiongkok meningkatkan persepsi mengenai ancaman kedaulatan teritorial seiring dengan kemungkinan Tiongkok untuk bertindak semakin ekspansif. Ketimpangan kuantitas kekuatan militer terhadap Tiongkok dalam hal ini merupakan aspek lain dari international constrain bagi setiap negara Asia Tenggara lainnya sehingga bertindak agresif secara langsung terhadap Tiongkok sejak awal bukan bagian dari opsi strategis dalam mengatasi krisis Laut Tiongkok Selatan. Maka dari itu guna mengatasi ketimpangan kekuatan,

pilihan dikalangan negara Asia Tenggara yang dominan tergolong pada kekuatan menengah adalah melakukan mekanisme perimbangan terhadap Tiongkok melalui kekuatan dominan lain dalam hal ini Amerika Serikat atau bergerak dalam kerangka institusional dalam yaitu ASEAN. Sebagai opsi lain adalah melakukan pendekatan Tiongkok sebagai pihak yang dianggap paling mengancam guna menghindarkan diri dari potensi serangan sekaligus memperoleh potensi keuntungan dibalik peningkatan posisi Tiongkok dalam tatanan global dewasa ini.

Kebijakan Kooperatif Pemerintahan Presiden Duterte Terhadap Kalim 9 Dash Line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Terdapat pergeseran pendekatan strategi yang signifikan terhadap Tiongkok pada masa Pemerintahan Presiden Duterte, akan tetapi bukan berarti Filipina saat ini melepaskan sepenuhnya klaim kedaulatan teritorialnya di Kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hanya saja memang preferensi pemerintahan saat ini lebih mengarah pada strategi kooperasi ketimbang melakukan perlawanan secara langsung terhadap agresifitas Tiongkok menyusul klaim terbarunya. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek, pertama faktanya hingga saat ini Filipina masih menempati wilayah Spratlys terutama di sembilan titik pulau dan karang melalui adanya camp militer komando barat Filipina begitu juga dengan basis nelayan terutama di Pulau Pag-Asa atau Thitu sebagai pulau terbesar (New York Times, 2017). Sementara itu pada aspek kedua, tidak terdapat upaya Pemerintah Filipina pada era Presiden Duterte dalam mencabut Dekrit Presiden 1596 oleh Presiden Marcos sebagai landasan hukum kepemilikan Kalayan (Spratlys). Presiden Duterte juga tidak melakukan perubahan terhadap RA 9522 mengenai pengajuan kontrol Filipina terhadap Spratlys sebagai regime island berdasarkan artikel UNCLOS. Begitu juga tidak terdapat tindakan Pemerintah Filipina dalam mencabut atau menolak

kemenangan klaimnya atas Tiongkok dalam putusan Pengadilan Arbitrasi Internasional pada tahun 2016 walaupun cenderung diabaikan seiring dengan langkah pendekatan bilateral Filipina terhadap Tiongkok. Dalam tatanan sistem pemerintahan Filipina, hingga saat ini Spratlys (Kalayan) tercatat sebagai bagian dari Provinsi Palawan dengan pulau utama yaitu Pag-asa sebagai salah satu dari 21 kota yang ada di Palawan (Official Website of Province Palawan, 2017).

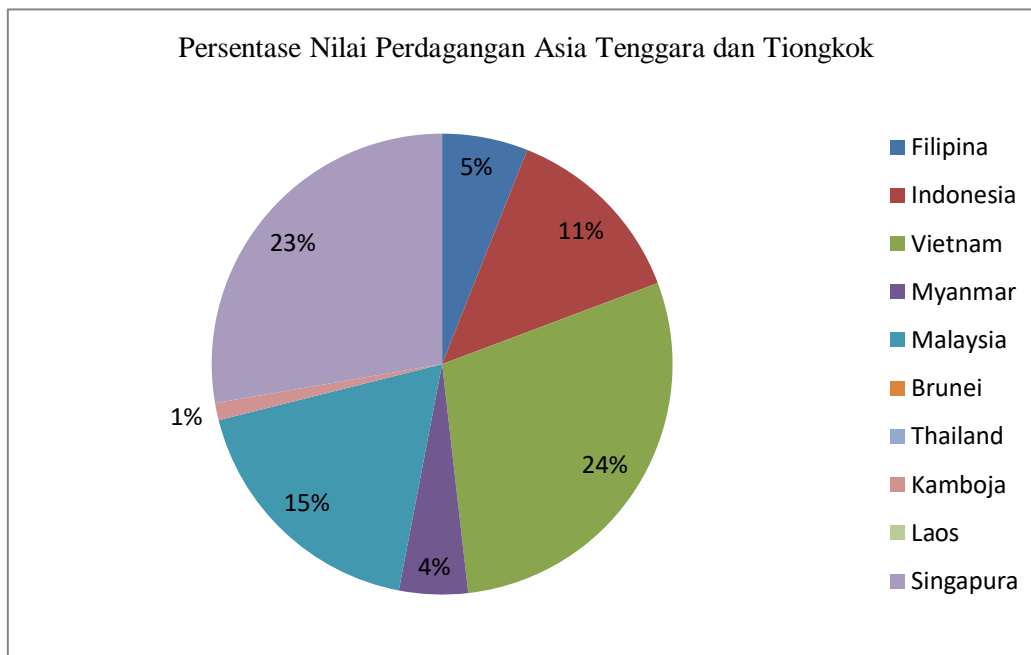
Arah kebijakan luar negeri baru terkait Laut Tiongkok Selatan terlihat nyata pada Oktober 2016 Presiden Duterte memprioritaskan Tiongkok sebagai destinasi utama dalam kunjungan kenegaraannya (CNN, 2016). Kunjungan kenegaraan Presiden Duterte kemudian menghasilkan serangkaian hasil positif dengan kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak terhadap periodisasi baru hubungan kedua negara. Kedua pihak juga menegaskan bahwa saat ini baik Tiongkok dan Filipina berada pada kondisi perkembangan hubungan terbaik dalam keterikatan bilateral. Dikutip dari berita Tiongkok, Xinhua (2016), joint statement oleh kedua negara pasca kunjungan pada 21 Oktober 2016. Secara spesifik mengenai situasi Laut Tiongkok Selatan terdapat tiga kesepakatan. Pertama adalah komitmen bahwa isu Laut Tiongkok Selatan tidak mempengaruhi keseluruhan perkembangan hubungan bilateral keduanya seiring dengan komitmen terhadap stabilitas dan perdamaian. Kedua adalah komitmen keduanya terhadap Code of Conduct (COC) sesuai dengan konsensus. Ketiga adalah mengenai keinginan untuk saling menahan diri terkait isu yang muncul di Laut Tiongkok Selatan bersamaan dengan kesepakatan akan pertemuan reguler guna membahas segala upaya kooperasi ekonomi dan energi yang dimungkinkan terhadap Laut Tiongkok Selatan. Kedua pihak kemudian menyepakati tiga belas dokumen perjanjian dalam bentuk memorandum of understanding (MoU). Secara spesifik dalam poin kesepuluh memuat

kesepakatan mengenai keinginan kedua pihak pada pembangunan kooperasi maritim serta pengawasan bersama terhadap Laut Tiongkok Selatan (Xinhua, 2016).

Perbaikan hubungan secara bilateral ini kemudian dilanjutkan melalui realisasi Bilateral Consultative Mechanism (BCM) berupa agenda pertemuan rutin mengenai penyelesaian permasalahan sengketa kedaulatan diantara keduanya (Fook, 2018). Pertemuan ini telah dilakukan sebanyak dua kali dengan menyepakati instalasi term of reference (ToR) berdasarkan pada pandangan, pengalaman, dan penawaran solusi kedua pihak mengenai Laut Tiongkok Selatan (Fook, 2018). Kedua negara menempatkan perdamaian dan stabilitas sebagai objek utama. Mengenai hal ini kemudian disepakati perlunya keberadaan technical working groups bersama dalam konteks eksploitasi sumber daya Laut Tiongkok Selatan. Melalui technical working groups juga berperan dalam melakukan identifikasi terhadap serangkaian inisiatif kooperasi yang dapat dilakukan oleh kedua negara terhadap nilai kawasan Laut tersebut (Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, 2018). Terdapat tiga keuntungan yang diperoleh meliputi akses aktivitas nelayan Filipina tanpa gangguan pihak Tiongkok. Kedua adalah perlindungan lingkungan Laut Tiongkok Selatan seiring dengan bantuan pihak Tiongkok. Ketiga adalah stabilitas kian stabil seiring dengan terbentuknya kerjama dengan Tiongkok (Departement of Foreign Affairs of Philippines, 2018).

Sikap kooperatif Pemerintah Filipina menurut penulis berhubungan dengan upaya mendorong maksimalisasi keuntungan ekonomi dari Tiongkok. Hal ini didukung oleh data yang memperlihatkan bahwa minimnya keuntungan yang diperoleh Filipina terhadap peningkatan kekuatan ekonomi

Tiongkok apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara lainnya. Mengacu pada data USCC (2015) berdasarkan survei tahun 2013 nilai total perdagangan Tiongkok di Asia Tenggara mencapai 400 milyar USD, sementara Filipina hanya melakukan nilai total perdagangan ekspor 19 milyar USD dan 18 milyar dolar pada impor dengan keuntungan hanya pada rata-rata hingga 1 milyar USD. Nilai perdagangan tersebut terbilang kecil apabila dibandingkan dengan negara berkembang Asia Tenggara lain terhadap Tiongkok. Tidak maksimalnya pemanfaatan peluang keuntungan perdagangan ini kemudian berlanjut hingga tahun berikutnya. Berdasarkan data oleh IMF DOTS menunjukkan penguasaan perdagangan Tiongkok pada tahun 2015 dengan persentase 15% atau total mencapai angka 395 milyar USD di Asia Tenggara, Filipina masih inferior pada persentase 5% dari nilai total perdagangan tersebut atau hanya berkisar pada kisaran 20 milyar USD sementara negara lain seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam pada rata-rata diatas 10% dari keseluruhan nilai perdagangan tersebut. Bukan hanya dari sektor perdagangan, tidak maksimalnya manfaat ekonomi yang mampu diraup Filipina dari Tiongkok juga tercermin dari minimnya Foreign Direct Investment (FDI) Tiongkok yang diarahkan bagi Filipina. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2013 tercatat jumlah stok FDI ini hanya berada pada kisaran 692 juta USD. Filipina juga terbilang terbelakang dalam mendapatkan dana dari program bantuan pembangunan infrastruktur Tiongkok. Pada tahun 2015 berdasarkan data CEIC (dalam Ah, 2017) sebagai awal insiasi program tersebut Tiongkok memberikan bantuan dana pembangunan infrastruktur dengan total kontrak mencapai 25 milyar USD bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi hanya 2 milyar USD nilai kontrak bantuan yang diperoleh Filipina dari Tiongkok.

Bagan 1:

Sumber”

Sejauh ini berbagai bilateralisme pada Pemerintahan Duterte terhadap Tiongkok telah menunjukkan bukti manfaat ekonomi. Pada kunjungan awal Presiden Duterte Oktober tahun 2016, Pemerintah Filipina mengklaim bahwa pihaknya dengan Tiongkok telah menyepakati nilai perdagangan dan investasi sebesar 24 milyar USD terutama dalam mendukung program pembangunan infrastruktur selama masa Pemerintahan Presiden Duterte (Departement Foreign Affairs of Philippines, 2018). Secara nyata tahun 2016 juga menjadi turning point peningkatan aktivitas perdagangan dan juga investasi terhadap Tiongkok. Berdasarkan data Global Edge pada tahun 2016 nilai perdagangan kedua negara meningkat dengan nilai total 22,1 milyar USD dengan surplus ekonomi 10 milyar USD bagi Filipina. Sementara data Otoritas Statistik Filipina (PSA) mencatat pada semester pertama tahun 2017 perdagangan dengan Tiongkok telah dominan dengan persentase 15% dari perdagangan total menghasilkan nilai total perdangan 11, 35 milyar USD. Begitu juga terdapat tren peningkatan aliran investasi Tiongkok ditengah-tengah penurunan nilai yang diberikan

oleh Amerika Serikat dalam rentan tahun 2016-2017. Bersamaan dengan keuntungan secara ekonomi yang diperoleh, langkah kooperatif ini diklaim memberikan dampak positif mengenai posisi Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Dengan mengesampingkan tensi di Laut Tiongkok Selatan terdapat adanya akses bagi nelayan Filipina tanpa adanya ancaman pihak Tiongkok. Selain itu terdapat rencana agenda joint exploration terhadap sumber daya di Laut Tiongkok Selatan. Kedua pihak juga disebutkan telah sepakat dan perjanjian eksplorasi akan dilakukan secara komersial antara Pemerintah Filipina dengan perusahaan minyak dan gas Tiongkok (SCMP, 2018).

Sikap kooperatif Filipina kemudian ditunjukkan dengan respon Pemerintah Filipina terhadap kemenangan di Pengadilan Arbitrasi Internasional. Alih-alih segera menetapkan serangkaian kebijakan lebih lanjut mengenai perlindungan teritorial yang sah secara hukum dari tindakan Tiongkok, Filipina justru melakukan respon yang terbilang mengesampingkan isu persengketaan ini. Pada ranah Diplomatik Pada ranah diplomatik,

ketimbang menggunkan ASEAN sebagai sarana memperoleh dukungan dikalangan negara-negara Asia Tenggara, secara kontradiktif justru enggan mendorong hasil arbitrase tersebut kedalam ranah multinasional termasuk ASEAN. Salah satunya ketika Filipina berkesempatan menjabat sebagai ASEAN chairman pada tahun 2017 justru kemenangan arbitrase ini tidak menjadi pembahasan secara spesifik dalam forum. Dikutip dari berita CNN (2017) dalam poin chairman statement ASEAN Summit ke-30 pada April 2017, tidak terdapat bagian pernyataan mengenai langkah bersama negara-negara ASEAN menysul ketetapan hukum arbitrase tersebut. Filipina sebagai chairman juga melewati urgensi pembahasan mengenai kegiatan militarisasi dan reklamasi pulau oleh Tiongkok yang seharusnya menjadi konsentrasi diantara negara-negara ASEAN (CNN, 2017). Pada ranah militer kemenangan hukum yang seharusnya dapat menjadi legitimasi dalam memperkuat presensi militer Filipina di kawasan sengketa justru berbanding terbalik dengan kebijakan pasif yang diterapkan. Pemerintah Filipina era Presiden Duterte justru melakukan serangkaian langkah minimalisasi terhadap setiap tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai aksi provokasi oleh Tiongkok (Castro, 2016: 150). Salah satunya Presiden Duterte memerintahkan bahwa militer Filipina (AFP) terutama angkatan laut untuk membatasi kegiatan patroli hanya di wilayah teritorial Filipina guna menghindari provokasi terhadap Tiongkok (Solomon dan Cullison, 2016).

Keengganan Pemerintah Filipina untuk tidak mersepon kemenangan arbitrase secara berlebihan dapat peneliti pahami sebagai pilihan strategis mengenai situasi dilema keamanan yang dihadapi. Bahwa negara-negara Asia Tenggara minim kekuatan politik mumpuni dalam melakukan counter-challenge atau bahkan memaksa mengikat Tiongkok dalam kesepakatan damai melalui kerangka ASEAN. Sehingga pada faktanya, terdapat

keleluasaan tersendiri bagi Tiongkok dalam memperbesar pengaruhnya di kawasan seiring minimnya tekanan yang mampu diberikan Asia Tenggara. Dalam hal ekonomi, penguasaan perdagangan Tiongkok di Asia Tenggara begitu juga dengan kontribusi investasi yang ditunjukkan. Melalui CNN (2017) tercatat bahwa negara pengklaim seperti Filipina pada tahun 2016 mendapatkan kesepakatan perdagangan dan investasi senilai 24 milyar USD dengan Tiongkok sama halnya dengan yang diperoleh Vietnam maupun Malaysia. . Kondisi ini kemudian yang menjadi salah satu dasar bagi ketidakmampuan dikalangan negara ASEAN dalam menekan kepatuhan Tiongkok. Dalam hal pertahanan militer, pilihan strategis ini berhubungan dengan fakta minimnya kekuatan Filipina terutama dalam konteks militer untuk melakukan persaingan lebih lanjut dengan pihak Tiongkok. secara kuantitas aset pertahanan Filipina tidak sebanding dengan aset pertahanan Tiongkok. Bahkan dalam menjangkau kawasan Kepulauan Spratlys, Tiongkok kini memiliki akses yang lebih besar dengan tujuh infrastruktur militer barunya disertai dengan fasilitas mumpuni. Mengenai ketimpangan kekuatan yang terjadi Presiden Duterte sendiri menambahkan bahwa hal yang dapat dilakukan oleh Filipina adalah menjadi teman dan diplomasi terhadap Tiongkok, sementara untuk melakukan perlawanan adalah sesuatu yang tidak realistis bagi Filipina (SCMP, 2018).

Berbeda dengan optimisme keterlibatan Amerika Serikat pada pemerintahan sebelumnya, era Duterte justru berbalik menilai bahwa aliansi dengan Amerika Serikat tidak membawa pengaruh signifikan terhadap perlindungan kedaulatan Filipina dari ekspansi Tiongkok. Kecenderungan menerapkan kebijakan pertahanan independen dalam ancaman kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan tercermin sejak awal pemerintahan melalui pernyataan Presiden Duterte mengenai keraguan perjanjian aliansi militer dengan Amerika Serikat sebagai respon efektif

menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan (Castro, 2016: 146). Indikasi ini direalisasikan dalam beberapa kebijakan. Berawal dari Pemerintah Filipina mengabaikan keikutsertaan dalam agenda US-ASEAN Summit 2016 dikarenakan kekecewaan Pemerintah Filipina terhadap sikap non-kooperatif Amerika Serikat terhadap kebijakan war on drugs. Lebih lanjut pada September 2016 Pemerintah Filipina menghentikan aktivitas militer dengan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan dan menegaskan tidak ingin terlibat dalam segala kegiatan militer oleh Amerika Serikat di kawasan sengketa tersebut (Castro, 2016: 148). Transisi pemerintahan yang dialami Amerika Serikat pada era Presiden Trump tidak banyak mengubah pilihan kooperatif Filipina terhadap Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan respon dingin pihak Filipina terhadap inisiasi kebijakan pertahanan Amerika Serikat di kawasan. Salah satunya terlihat perihal kemunculan kembali konsentrasi Amerika Serikat terhadap isu Laut Tiongkok Selatan sejak pertengahan tahun 2017. Tidak terdapat keterlibatan Filipina dalam aktivitas militer Amerika Serikat. Begitu juga tidak terdapat perlawanan dari aktivitas yang dilakukan. Ketidakterlibatan terhadap kebijakan Amerika Serikat tersebut tidak terkait dengan kepentingan Filipina, sehingga Filipina tetap pada pendirian untuk bersikap independen dan tidak ingin terlibat pada segala tindakan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan (Straits Times, 2018).

Pilihan Presiden Duterte untuk bersikap lebih independen dalam pertahanan di Laut Tiongkok Selatan berakar pada tidak adanya jaminan pertahanan dari Amerika Serikat. Pemahaman ini diawali dari penarikan pangkalan militer Amerika Serikat dari Subic Bay dan Clark Air Base Filipina sejak 1992. Pangkalan ini merupakan markas bagi armada udara ke-13 berfungsi sebagai penghubung, komunikasi sekaligus proyeksi utama aktivitas udara Amerika Serikat di Asia Pasifik. Begitu juga Pangkalan Subic

merupakan basis angkatan laut utama Amerika Serikat di Asia Pasifik (San Juan, 1993). Ambiguitas mengenai komitmen Amerika Serikat kemudian berlanjut dewasa ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi degradasi kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Kondisi ini mengacu pada dua hal yaitu, pertama mengacu pada stagnasi dana militer yang dialami Amerika Serikat pasca tahun 2010. Faktanya di Asia Pasifik, pihak U.S Pacific Command (PACOM) (dalam Green 2013) menilai bahwa pihaknya mengalami tantangan dana operasional secara fundamental seiring dengan krisis distribusi anggaran yang mana pada 2013 Amerika hanya mencatatkan 487 milyar USD total untuk aktivitas militernya. Kondisi tersebut berdampak pada minimalisasi operasi dan aset PACOM dalam melakukan aktivitasnya. Penurunan ini kemudian diikuti dengan degradasi dan pengalihan basis militer di Okinawa (Jepang) menuju Guam dan Hawaii. Pengalihan ini menjadi permasalahan keamanan tersendiri bagi Asia Pasifik mengingat Okinawa merupakan salah satu basis utama PACOM dengan jumlah kekuatan 80% dari keseluruhan armada Amerika Serikat di Asia Pasifik.

Permasalahan mengenai komitmen ini berlanjut pada era Presiden Trump, pada dasarnya tidak terdapat penurunan fokus Amerika di Asia Pasifik sebagai kawasan penting bagi kepentingannya. Terjadi intensifikasi fokus Amerika Serikat hanya terhadap kontestasi geopolitik dengan Korea Utara perihal ancaman senjata nuklir. Terlihat sejak awal, Pemerintahan Trump fokus dalam kegiatan diplomasi ke Jepang dan Korea Selatan pada awal tahun 2017. Secara khusus melalui diplomasinya ke Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, membahas mengenai Korea Utara dengan melahirkan kesepakatan kedua pihak dalam memberikan sanksi ekonomi bagi tindakan nuklir yang dilakukan Korea Utara. Disisi lain pertemuan ini tidak terdapat agenda pembahasan Pemerintahan Trump

mengenai Laut Tiongkok Selatan secara spesifik dengan Tiongkok (Thayer, 2017: 15). Kenyataan rendahnya komitmen dan tidak adanya konsentrasi spesifik Pemerintahan Amerika Serikat saat ini terhadap keamanan Filipina di Laut Tiongkok Selatan merupakan dasar bagi Pemerintahan Filipina era Duterte untuk melakukan kebijakan pertahanan independen dengan mengesampingkan segala bentuk perjanjian pertahanan diantara keduanya pada masa pemerintahan sebelumnya. Secara tidak langsung Pemerintah Filipina saat ini memandang mekanisme *indirect balancing* melalui Amerika Serikat tidak lagi dapat melindungi Filipina dalam ancaman kedaulatan, melainkan pendekatan terhadap Tiongkok sebagai opsi paling strategis menghadapi permasalahan Laut Tiongkok Selatan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan kooperatif Pemerintah Filipina era Presiden Duterte diimplementasikan dalam berbagai langkah. Salah satu wujud nyatanya adalah tercapainya berbagai kesepakatan bilateral di bidang pertahanan, ekonomi, dan sosial guna kondisi damai terhadap pihak Tiongkok. Pola bilateralisme terhadap Tiongkok ini diawali dengan kunjungan Presiden Duterte pada Oktober 2016 dengan menghasilkan berbagai poin kesepakatan termasuk mengenai Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, pergeseran strategi menghadapi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan era Presiden Duterte terlihat dari respon yang dilakukan terhadap kemenangan di ranah arbitrase. Seiring dengan keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina, Pemerintah Filipina justru menerapkan kebijakan minimalisasi aksi provokasi di kawasan sengketa. Pemerintah Filipina di bawah Presiden Duterte juga mengarahkan kebijakan pertahanan yang lebih independen dari

ketergantungan terhadap perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan penghentian kegiatan patroli maupun latihan militer bersama Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu Filipina era Duterte justru tidak lagi melakukan langkah agresif terutama mengenai kehadiran pangkalan militer Tiongkok di Spratlys melalui bantuan kekuatan militer Amerika Serikat.

Serangkaian langkah pendekatan yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan kapabilitas Tiongkok sebagai salah satu *great power* terutama mengkhusus di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan kapabilitas Tiongkok ini dapat dilihat dari dua indikator utama yaitu perekonomian dan militer. Dalam konteks ekonomi, dewasa ini tidak dipungkiri bahwa Tiongkok berkembang menjadi kekuatan baru perekonomian dunia. Adanya perbedaan kapabilitas ekonomi kemudian beriringan dengan potensi perekonomian Tiongkok yang tidak dapat dihindarkan bagi Filipina yang sedang dalam proses perkembangan. Perbedaan kapabilitas ekonomi kemudian sejalan dengan inferioritas kapabilitas Filipina terhadap Tiongkok dalam sektor pertahanan militer. Melalui program modernisasi dan transformasi militer dalam dekade terakhir, Tiongkok menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer paling mumpuni. Perkembangan dan proyeksi militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tersebut merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan Filipina. Sementara di sisi lain, Filipina merupakan negara yang tergolong lemah secara militer bahkan dalam lingkup kawasan. Selain itu, pilihan Pemerintah Filipina untuk kooperatif terhadap Tiongkok dapat dipahami mengenai tidak adanya perlindungan nyata oleh aktor lain dalam membendung ancaman Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan degradasi kehadiran dan peranan Amerika Serikat di kawasan.

Daftar Pustaka

- [1] ABS-CBN News, 2017. Duterte to Finalize China Deals in Second Trip to Beijing [online]. Dalam <https://news.asbn-cbn.com/business/05/08/17/duterte-to-finalize-china-deals-in-second-trip-to-beijing>. Diakses Pada 28 April 2018.
- [2] Ah, OH Yoon, 2017. China Economic Ties with Southeast Asia. Korean Institute for International Economic Policy.
- [3] Breuning, Marijke, 2007. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York : Palgrave Mcmillan.
- [4] Cai, Peter. 2017. Understanding China's Belt and Road Initiatives. Lowy Institute For International Policy.
- [5] Castro, Renato Cruz, 2016. The Philippines in the South China Sea Dispute. National Security Colage of Australian National University.
- [6] Castro, Renato Cruz, 2016. "The Duterte Administration's Foreign Policy: Unravelling the Aquino in the Philippines", dalam Journal of Current Southeast Asian Affair, vol. 35, no.3. pp. 139-159.
- [7] CNN, 2017. ASEAN Chairman Statement Plays Safe on South China Sea [online]. Dalam <https://cnnphilippines.com/news/2017/11/16/ASEAN-chair-statement-plays-safe-south-china-sea-analyst.html>. Diakses Pada 3 Mei 2018.
- [8] Departement of Foreign Affairs of Republic of Philippines, 2018. Philippines China Bilateral Consultative Mechanism Focuses on Coopreation and Colaboration [online]. Dalam <https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/15567-philippines-china-bilateral-consultation-mechanism-focuses-on-cooperation-and-collaboration-while-having-frank-and-candid-discussions-on-issues-whe>. Diakses Pada 22 April 2018.
- [9] Fook, Liang Lye, 2018. The China Philippine Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea: Prospect and Challenges. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- [10] Fravel, Taylor, 2008. Strong Borders Secure Nation : Cooperation and Conflict in China's Territorial. Pricenton University Press.
- [11] Global Edge, 2016. Philipines: Trade Statistic [online]. Dalam <https://globaledge.msu.edu/countries/philippines/tradestats>. Diakses Pada 1 Mei 2018.
- [12] Global Fire Power, 2018. China Military Strength [online]. Dalam https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china. Diakses Pada 17 Februari 2018.
- [13] Global Fire Power, 2018. Philippines Military Power [online]. Dalam https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=philippines. Diakses Pada 17 Februari 2018.
- [14] Heristovitch, Benjamin, 2017. A Balanced Threat Assessment of China's South China Sea Policy [online]. Dalam http://www.cato.org/publications/policy-analysis/balance-threat- assesment-chinas-south-china-sea-policy#_idTextAnchor028. Diakses Pada 29 April 2018.
- [15] Heydarian, Richard Javad, 2016. Manila's Tough Post Arbitration Options [online]. Dalam <https://www.amti.csis.org/manilas-tough-post-arbitration-options/>. Diakses Pada 17 April 2018.
- [16] Hudson, Valerie, 2014. Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory. Rowman and Littlefield Publisher.
- [17] Lunn Jon dan Arrabela Lang, 2016. "The South China Sea Dispute : 2016 Update", dalam Briefeing Paper Number 7481. House of Commons Library.
- [18] Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018. Joint Press Relase Second Meeting of China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on te South China Sea [online]. Dalam http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1534824.shtml. Diakses Pada 22 April 2018.
- [19] Ortueste, Maria, 2013. "The Philippines in the South China Sea : Out of Time, Out of Option ?", dalam South East Asian Affairs, pp. 240-253.
- [20] Philippine Statistic Authority, 2017. Foreign Trade Statistic First Semester 2017 [online]. Dalam <https://pas.gov.ph/gsearch?%2F=Foreign+trade+statistic+first+semester+2017>. Diakses Pada 1 Mei 2018.
- [21] Presidential Communication Opreation Office of Republic of The Philippines, 2018. PH China Sign Six Bilateral Agreement [online]. Dalam https://pocoo.gov.ph/news_releases/ph-china-sign-six-bilateral-agreement/. Diakses Pada 30 April 2018.
- [22] Rustadi, Agus, 2015. "The Impact of China's 9 Dash Line Claim on ASEAN's Role in the Indo-Pasific Region", dalam Indo Psific Strategic Papers.
- [23] San Juan, Rolando, 1993. Closure of US Military Bases in The Philippines: Impact and Implication. US Army Collage, Carlisle Barrack.
- [24] South China Sea Morning Post, 2018. Philippines Eyes Oil Gas Deal with China in South China Sea within Months [online]. Dalam <http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2140911/philippines-eyes-oil-gas-deal-china-south-china-sea>. Diakses Pada 20 April 2018.
- [25] South China Morning Post, 2018. Rodrigo Duterte Says Chinese Military Base are There Not to Oppose Philippines [online]. Dalam <http://www.scmp.com/news/asia/article/2133869/rodrigo-duterte-says-chinese-military-bases-are-oppose-us-not-philippines>. Diakses Pada 10 April 2018.
- [26] Storey, Ian James. 1999. "Creeping Assertiveness: China Philippine and South cHina Sea Dispute", dalam Contemporary Southeast Asia, Vol. 21, No. 1, pp. 95-118.

- [27] Storey, Ian, 2011. China and the Philippine: Implication of Reed Bank Incident [online]. Dalam <https://jamestown.org/program/china-and-the-philippines-implications-of-the-reed-bank-incident/>. Diakses Pada 20 April 2018.
- [28] Thayer, Charlyle, 2017. "The Trump Administration Policy on South China Sea", dalam Persentation to 3rd International Conference on Security and Cooperation in the South China Sea.
- [29] Tweed, David dan Adrian Leung. Chinois Making A Bold Military Power Play [online]. <https://www.bloomberg.com/graphics/2018-china-navy-bases/>. Diakses Pada 16 April 2018.
- [30] USCC, 2015. China Economic Ties with ASEAN : A Country by Country Analysis. Staff Research Report.
- [31] Velasco, Mark Anthony M., 2014. "Philippines-China Relation : The Case of the South China Sea Claims", dalam *Asia Pasific Journal of Multidiciplinary Research*, vol. 2, no. 6.
- [32] Walt, Stephen M., 1985. "Alliances : Balancing and Bandwagoning", dalam *Anarchy and its Consequences*, pp. 110-117.
- [33] Willige, Andrea, 2016. The World Top Economy: the US vs China [online]. Dalam <https://www.weforum.org/agenda/2016/12/the-world-top-economy-the-us-vs-china-in-five-chart/>. Diakses Pada 5 Mei 2018.
- [34] World Bank, 2017. GDP China [online]. Dalam https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=CN&start=1960&view=chart&year_high_desc=true. Diakses Pada 6 Februari 2018.
- [35] World Bank, 2017. GDP Philippines [online]. Dalam <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PH>. Diakses Pada 6 Februari 2017.
- [36] Xinhua News, 2016. Full Text Joint Statement of China and the Philippines of China and the Philippines [online]. Dalam https://www.xinhuanet.com/english/china/2016-10/21/c_135771815.html. Diakses Pada 30 April 2018.
- [37] Zhao, Hong, 2012. "Shino-Philippines Relation : Moving Beyond South China Sea Disputes", dalam *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 26, pp. 57-76.